

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU**

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menerbitkan dan menguasai informasi	Penanggung jawab Publikasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Cara Pengumuman dan Penyidikan Informasi	Informasi			Informasi yang Dikecualikan (data agregat dan data pribadi)	Jangka Waktu atau Referensi Arsip	Keterangan
<b>Kepegawaian</b>												
1	Data Pribadi Pegawai : - Daftar riwayat hidup pegawai - Hasil general check up kesehatan pegawai - Hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai - Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai - Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank pegawai - Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal - Pegawai Negeri Sipil (PNS) Elektronik - Berkas dan Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota		SEKRETARIAT	SEKRETARIAT		Hardcopy				√	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan atau menduduki jabatan publik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;
2	Penjatuhan Hukuman disiplin : - Surat panggilan atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai - Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai - Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di Dinas/Badan/Lembaga - Keputusan Hukuman Disiplin dari Instansi terkait - Laporan Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat Berwenang - Berita acara beserta resume dan notulen sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin dari BKA - Keputusan Hukuman Disiplin dari BKA - Identitas Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin		SEKRETARIAT	SEKRETARIAT		Hardcopy				√	Sampai memperoleh ketetapan dari yang berwenang	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j; 2. PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 31 ayat (1) dan (2); 3. Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3	Dokumen Perceraian - Identitas PNS yang mengajukan izin Perceraian/Perkawinan - Dokumen Notulensi rapat Tim Penyelesaian Kasus Perceraian		SEKRETARIAT	SEKRETARIAT		Hardcopy				√	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan atau menduduki jabatan publik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h;
4	Daftar Rencana Penempatan CPNS : - Data usulan penempatan - Data usulan pemindahan - Data usulan pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum		SEKRETARIAT	SEKRETARIAT		Hardcopy				√	Sampai diterbitkan SK dan pelantikan sebagai pejabat publik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i;
5	Data Pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka		SEKRETARIAT	SEKRETARIAT		Hardcopy				√	Sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf j; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
6	Penilaian Prestasi Kerja dan absensi pegawai		SEKRETARIAT	SEKRETARIAT		Hardcopy				√	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4;
<b>Keuangan dan Aset</b>												

1	Laporan Keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK dan belum ditetapkan dalam Qanun Pertanggungjawaban APBA		SEKRETARIAT	SEKRETARIAT		Hardcopy				√	Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2);
2	1. Informasi tentang Wajib Pajak Daerah 2. Laporan Pajak Pribadi 3. Data Pihak Ketiga dalam SP2D		SEKRETARIAT	SEKRETARIAT		Hardcopy				√	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang berwenang dan terkait dengan proses pengadilan dan pemeriksaan keuangan oleh instansi yang berwenang	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1) dan (2);
<b>Sumber Daya Alam</b>												
1	Data proses pemeriksaan laboratorium terhadap Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Hardcopy				√	Setelah selesai Laporan Hasil Uji (LHU) dan dinyatakan terbuka untuk publik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;
2	Daftar Usulan Sertifikasi Mutu Benih		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Hardcopy				√	Sampai dengan proses pemberian sertifikasi selesai	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23;
3	Lembaran Hasil Pemeriksaan Benih		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Hardcopy				√	Sampai ada ketetapan pimpinan tertinggi Badan Publik	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23;
4	Berita Acara dan Laporan Hasil Operasi Pengamanan Hutan yang Sedang dalam proses hukum		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Hardcopy				√	Sampai adanya keputusan pengadilan dan terbuka untuk umum	1. - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1; 2. - Moratorium Logging Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 Pasal 10 ayat (a);
5	Inovasi hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan yang belum mendapatkan perlindungan HaKI		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Hardcopy				√	Sampai dengan proses pemberian Sertifikasi selesai	1. - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j; 2. - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 Pasal 10 huruf b;
6	Dokumen Tata Batas Kawasan Hutan yang belum ketemu gelang		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Hardcopy				√	Tidak Terbatas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d;
7	Peta Kehutanan dalam bentuk SHP		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Hardcopy				√	Tidak Terbatas	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 62; Undang-Undang ITE;
8	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kegiatan dan Kertas Kerja Pengawasan		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Hardcopy				√	Tidak Terbatas	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 Pasal 10 huruf d;
9	Berita Acara dan Laporan Pengawasan Ketaatan Pelaku Usaha		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Hardcopy				√	Tidak Terbatas	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b,
10	Data Pribadi Pemegang Saham Perusahaan (PBPH)		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Hardcopy				√	1. Tidak Terbatas 2. Pasal 18 Ayat (2) Huruf a 3. Pasal 18 Ayat (2) Huruf b	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h angka 3;

11	Dokumen Lingkungan Hidup yang masih dalam proses pemeriksaan/penilaian		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Hardcopy				√	Setelah selesai diproses dan mendapatkan pengesahan	1. - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d dan j; 2. - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12	Surat Pertimbangan Teknis Permohonan rekomendasi Perizinan Berusaha		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Website				√		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;
13	Surat Pertimbangan Teknis Permohonan rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Website				√	Tidak Terbatas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;
14	Surat Pertimbangan Teknis Permohonan rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Website				√	Tidak Terbatas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;
15	Surat Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Website				√	Tidak Terbatas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;
17	Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Website				√	Tidak Terbatas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;
18	Persetujuan Teknis Pengumpulan LB3 Skala Provinsi		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Website				√	Tidak Terbatas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;
19	Surat Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Website				√	Tidak Terbatas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i;
20	Persetujuan Teknis Pembuangan / Pemanfaatan Air Limbah		Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan		Website				√	Tidak Terbatas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;
<b>Pengadaan Barang dan Jasa</b>												
1	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang		PPK / SEKRETARIAT / BIDANG	PPK / SEKRETARIAT / BIDANG		Hardcopy				√	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan	1. - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j; 2. - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf b;
2	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sengketa		PPK / SEKRETARIAT / BIDANG	PPK / SEKRETARIAT / BIDANG		Hardcopy				√	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;
3	Nomor Rekening Perusahaan dan Metodologi Pelaksanaan yang Terdapat Dalam Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa		PPK / SEKRETARIAT / BIDANG	PPK / SEKRETARIAT / BIDANG		Hardcopy				√	Sampai dengan persetujuan perusahaan yang bersangkutan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h angka 3;
4	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa		PPK / SEKRETARIAT / BIDANG	PPK / SEKRETARIAT / BIDANG		Hardcopy				√	Sampai proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak kerjasama	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;

Ditetapkan di : Pekanbaru.  
Pada tanggal:  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN PROVINSI RIAU**

  
**MAMUN MU'ROD**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660610 199203 1 008